BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari usaha besar, dengan kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan karakteristik tersebut, UKM umumnya memiliki skala usaha yang relatif terbatas dan dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha. UKM juga cenderung menjalankan aktivitas operasional dengan sistem pengelolaan yang masih sederhana. Kondisi ini menyebabkan UKM sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi modal, tenaga kerja, maupun sistem administrasi dan pengelolaan usaha.

Dalam konteks perekonomian nasional, usaha kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing nasional. Namun demikian, peran strategis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan UKM dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menghambat pengambilan keputusan usaha, menurunkan kepercayaan pihak eksternal, serta membatasi akses UKM terhadap sumber pembiayaan formal. Bank Dunia (2023) menegaskan bahwa kelemahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan UKM di negara yang berkembang untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut juga tercermin di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM (2023) melaporkan bahwa sebagian besar UKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara rapi, sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Padahal, laporan keuangan yang berkualitas seharusnya berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja usaha, perencanaan bisnis, serta persyaratan administratif dalam memperoleh akses permodalan.

Rendahnya kualitas laporan keuangan ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan UKM.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2015) melalui PSAK 1, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam konteks UKM, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha. Laporan keuangan yang berkualitas ditentukan oleh keandalan, relevansi, dan ketepatan penyajian informasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan bisnis dan memperluas akses UKM terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Kualitas laporan keuangan sangat penting bagi keberlanjutan UKM. Hal ini membantu UKM untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Peningkatan literasi keuangan serta adanya bimbingan yang memadai dalam proses pelaporan membantu UKM memahami cara menyusun laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Pada akhirnya, kemampuan ini akan meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan mitra bisnis, dan membuka kesempatan untuk memperoleh sumber pembiayaan yang berkelanjutan (Nasyiah & Nandiroh, 2024). Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai strategi penting untuk mempertahankan operasional bisnis UKM dan memperluas kolaborasi dengan sistem pembiayaan formal dan informal.

Salah satu faktor utama yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Kuningan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum disiplin dalam pengelolaan keuangan, sehingga berujung pada gulung tikar (*collapse*) hampir separuh UKM di wilayah tersebut (DetikJabar, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan krusial yang dapat mengancam keberlanjutan usaha. Permasalahan mendasar dari kondisi tersebut terletak pada ketidakmampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Menurut Kepala bidang Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Penindustrian menyampaikan bahwa mayoritas UKM masih melakukan pencatatan keuangan dengan cara yang sederhana dan belum terstruktur. Selain itu, pemahaman pelaku usaha mengenai akuntansi masih terbatas, sehingga laporan keuangan yang dibuat belum memenuhi standar kualitas yang baik. Masih banyak para pelaku usaha belum memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha, yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan bisnis mereka (Kuningan.id). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan UKM belum optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan pemahaman akuntansi serta penerapan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur.

Menanggapi berbagai masalah yang dialami oleh pengusaha UMKM, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan banyak usaha untuk memperbaiki kemampuan pengusaha, terutama dalam pengelolaan uang dan penggunaan teknologi digital. Usaha ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, salah satunya adalah pelatihan tentang literasi digital yang diikuti oleh sekitar 300 pengusaha UMKM di Kabupaten Kuningan (Kuningan mass). Tujuan program ini adalah untuk membantu pengusaha memahami cara menggunakan teknologi digital agar kegiatan usaha dan pengelolaan dapat berjalan lebih baik. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pengusaha UMKM tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga dapat menggabungkannya dalam mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan dengan cara yang lebih teratur.

Namun demikian, meskipun sudah banyak program yang dijalankan, masih ada berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam manajemen keuangan. Berdasarkan survei awal, terungkap bahwa kebanyakan pelaku UKM di Kabupaten Kuningan belum membuat laporan keuangan secara teratur dan konsisten. Laporan keuangan belum dianggap sebagai hal yang penting untuk menjalankan usaha, melainkan hanya dibuat pada waktu-waktu tertentu, seperti saat dibutuhkan untuk mengajukan dana atau bantuan usaha. Akibatnya, pencatatan keuangan tidak dilakukan secara

terus-menerus dan tidak sama antara periode, membuat pelaku usaha kesulitan untuk menilai perkembangan usaha mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat belum bisa diandalkan dengan baik dan belum bisa dibandingkan antar periode, misalnya dalam membandingkan perubahan omzet, laba, maupun biaya usaha dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al., (2024) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal dan penerapan SAK EMKM. Sementara itu, penelitian Lestari et al., (2025) menemukan faktor lain yaitu digitalisasi akuntansi. Menurut penelitian Oktavia & Fahriani, (2025) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu literasi digital. Pada penelitian ini hanya berfokus pada empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan UKM, diantaranya yaitu penerapan SAK EMKM, pemahaman akuntansi, literasi digital dan digitalisasi akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standarisasi akuntansi khusus yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini bertujuan untuk mempermudah Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan mudah dipahami, tetapi tetap sesuai dengan standar. Penerapan SAK EMKM dapat membantu pelaku UKM memperoleh akses pembiayaan eksternal, seperti pinjaman perbankan atau investasi, karena laporan keuangan yang sesuai standar dianggap lebih transparan dan dapat dipercaya oleh pihak ketiga (Nata et al., 2025). Dengan demikian, SAK EMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pencatatan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap kemampuan UKM dalam mengelola keuangan usahanya.

Dalam praktiknya, penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UKM di Indonesia masih relatif rendah. Kenyataan, yang terjadi masih banyak UKM yang belum mengadopsi standar akuntansi tersebut secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi yang diformulasikan oleh IAI melalui DSAK belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Akibatnya, laporan keuangan UKM masih cenderung secara sederhana, informal, dan belum sistematis (Manehat, 2022). Kesenjangan antara ketersediaan standar dan praktik penerapannya di lapangan ini menjadi tantangan krusial dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan UKM.

Terdapat hasil penelitian yang bertentangan mengenai pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian dari Nisa & Susilo (2025) menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Purbowanti & Lutfi, 2023) menemukan bahwa penerapan SAK EMKM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan UKM.

Pemahaman akuntansi adalah upaya memahami pengetahuan akuntansi yang meliputi pembukuan dan proses pelaporan keuangan dengan berpedoman atau mengacu kepada prinsip dan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang berlaku saat ini (Mutiari & Yudantara 2021). Pemahaman akuntansi yang memadai memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menyusun laporan keuangan secara lebih akurat, memantau kinerja bisnis, mengidentifikasi peluang dan risiko keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan data. Namun, pada kenyataannya sebagian besar pelaku UKM belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai, sehingga pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan manual. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan UKM, pemahaman akuntansi ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam tiga proses utama, yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan. Rendahnya pemahaman pelaku UKM tentang konsep pencatatan ganda sering menyebabkan tercampurnya transaksi usaha dengan transaksi pribadi, sehingga informasi keuangan menjadi tidak akurat. Selain itu, kesalahan dalam pengklasifikasian akun seperti aset, liabilitas, dan ekuitas menghasilkan informasi keuangan yang menyesatkan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan berdampak langsung pada ketidaktepatan laporan keuangan yang disajikan, meskipun sistem atau teknologi yang digunakan sudah memadai (Tatik et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman dasar akuntansi menjadi prasyarat penting sebelum penerapan standar akuntansi seperti SAK EMKM dapat berjalan secara efektif.

Selain penerapan standar akuntansi, pemahaman akuntansi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun demikian, hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2025) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wailan' An, (2022) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UKM.

Menurut Paul Glister literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk yang bersumber dari media digital melalui perangkat komputer. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Bagi pelaku UKM, literasi digital menjadi kompetensi penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal,

khususnya dalam pengelolaan keuangan usaha. Seiring meningkatnya akses terhadap teknologi digital, pelaku UKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka melalui pemanfaatan aplikasi dan perangkat lunak akuntansi (Oktavia & Fahriani, 2025).

Dengan tingkat literasi digital yang memadai, pelaku UKM mampu mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi keuangan secara lebih sistematis dan efektif, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Kemampuan ini mendorong ketepatan pencatatan transaksi serta meningkatkan keandalan data keuangan yang dihasilkan. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Fahriani (2025), yang menyatakan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Digitalisasi akuntansi adalah proses transformasi pencatatan dan pelaporan keuangan dari sistem manual menuju sistem yang berbasis teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi akuntansi, perangkat lunak laporan keuangan, dan layanan *cloud accounting*. Penerapan teknologi ini memungkinkan proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara lebih akurat, efisien terintegrasi. Digitalisasi akuntansi mencakup otomatisasi input transaksi, integritas data keuangan, penyimpanan berbasis *cloud*, dan kemudahan akses terhadap laporan keuangan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, penelitian Majiding & Hidayatullah (2025) menemukan bahwa penggunaan perangkat lunak akuntansi berbasis *cloud* mampu mengotomatisasi penyusunan laporan neraca dan laba-rugi serta meningkatkan transparansi pencatatan keuangan.

Hubungan antara digitalisasi akuntansi dengan peningkatan kualitas laporan keuangan menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat. Penerapan teknologi akuntansi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sistem pendukung yang menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan keterandalan informasi keuangan. Dengan sistem digital, risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dapat diminimalkan, karena sebagian besar transaksi dicatat secara otomatis dan disimpan dalam basis data yang

konsisten (Hakim & Iswahyudi, 2024). Melalui sistem digital, setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri kembali, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan (Raharjo et al., 2025).

Digitalisasi akuntansi memungkinkan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) melakukan proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih cepat, efisien, dan akurat melalui pemanfaatan aplikasi atau sistem berbasis digital. Kemampuan ini berdampak langsung pada peningkatan mutu dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari et al., (2025) menunjukkan pada hasil penelitiannya bahwa variabel digitalisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al., (2024), yang menganalisis pengaruh penerapan SAK EMKM dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Terdapat perbedaan signifikan yang menjadi inovasi penelitian ini. Perbedaannya adalah penambahan variabel literasi digital dan digitalisasi akuntansi yang memperkaya model penelitian. Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan inovasi penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Pengaruh Penerapan SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, Literasi Digital, dan Digitalisasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Kuningan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan SAK EMKM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM?

3. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM?
4. Apakah digitalisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UKM
2. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UKM
3. Pengaruh literasi digital terhadap kualitas laporan keuangan UKM
4. Pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UKM

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis dan empiris sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan literatur tentang akuntansi dan manajemen UKM, khususnya tentang pemahaman akuntansi, literasi digital, digitalisasi akuntansi, dan penerapan SAK EMKM. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut memengaruhi kualitas laporan keuangan UKM secara keseluruhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan saran praktis kepada pelaku UKM di Kabupaten Kuningan. Wawasan ini mencakup pentingnya dan metode untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan keuangan mereka. Peningkatan kualitas pelaporan tersebut

dapat direalisasikan melalui penerapan SAK EMKM secara benar, peningkatan pemahaman akuntansi, serta pemanfaatan optimal literasi digital dan sistem akuntansi digital. Seluruh upaya ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan usaha.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data dan temuan empiris yang dapat dijadikan acuan strategis oleh pemerintah, lembaga pelatihan, dan konsultan. Data tersebut sangat berguna dalam perumusan program pendampingan, pelatihan, dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Program yang dirancang dapat difokuskan pada peningkatan literasi digital dan pemahaman SAK EMKM. Fokus ini memungkinkan pelaku UKM mencapai kemandirian dalam mengelola keuangan usaha mereka secara profesional.